

# REKAP 3: KEGIATAN K/L

## RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

### TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
2. PROGRAM : CL - Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Lintas Sektoral Yang Efektif  
02 - Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi
4. KEGIATAN : 4553 - Koordinasi Bidang Hukum dan HAM
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 13 - Asdep Koordinasi Materi Hukum  
29 - Asdep Koordinasi Penegakan Hukum  
06 - Asdep Koordinasi Hukum Internasional  
19 - Asdep Koordinasi Hak Asasi Manusia  
57 - Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

#### 6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral Yang Efektif		17.762.720,0
01.01	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	80	
01.02	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100	
01.03	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	83	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
02	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM		1.155.900,0
02.01	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)	
02.02	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	33	
02.03	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	4.2	
02.04	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy	82	
Total			18.918.620,0

## 7. RINCIAN KEGIATAN

## A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral Yang Efektif</i>										17.762.720,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										6.562.720,0
01.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum										1.790.430,0
	051 - Identifikasi Masalah Bidang Materi Hukum										536.448,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								536.448,0
	052 - Analisis Kebijakan Bidang Materi Hukum										511.452,0
		Pusat	Pusat								511.452,0
	053 - Penyusunan Rekomendasi Bidang Materi Hukum										308.495,0
		Pusat	Pusat								308.495,0
	054 - Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum										434.035,0
		Pusat	Pusat								434.035,0
01.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum										2.191.400,0
	051 - Identifikasi Masalah Bidang Penegakan Hukum										774.910,0
		Pusat	Pusat								774.910,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Analisis Kebijakan Penegakan Hukum										660.162,0
		Pusat	Pusat								660.162,0
	053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum										445.572,0
		Pusat	Pusat								445.572,0
	054 - Tindak Lanjut rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Bidang Penegakan Hukum										310.756,0
		Pusat	Pusat								310.756,0
01.ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional										1.099.370,0
	051 - Identifikasi Masalah Bidang Koordinasi Hukum Internasional										261.953,0
		Pusat	Pusat								261.953,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional										394.980,0
		Pusat	Pusat								394.980,0
	053 - Penyusunan Rekomendasi Bidang Koordinasi Hukum Internasional										313.518,0
		Pusat	Pusat								313.518,0
	054 - Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional										128.919,0
		Pusat	Pusat								128.919,0
01.ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia										1.481.520,0
	051 - Identifikasi Masalah Bidang Hak Asasi Manusia										442.596,0
		Pusat	Pusat								442.596,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Analisis Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia										405.236,0
		Pusat	Pusat								405.236,0
	053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia										394.008,0
		Pusat	Pusat								394.008,0
	054 - Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia										239.680,0
		Pusat	Pusat								239.680,0
01.ABD.007	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Analisis Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Penyusunan Rekomendasi Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	054 - Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM										11.200.000,0
01.PBD.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	003 - Anggaran Responsif Gender		4.200.000,0
	051 - Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum										633.240,0
		Pusat	Pusat								633.240,0
	052 - Analisis Kebijakan Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum										1.930.605,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								1.930.605,0
	053 - Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum										843.094,0
		Pusat	Pusat								843.094,0
	054 - Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum										793.061,0
		Pusat	Pusat								793.061,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.PBD.006	Rekomendasi Kebijakan Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan			4.000.000,0
	051 - Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak										715.360,0
		Pusat	Pusat								715.360,0
	052 - Analisis Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak										997.710,0
		Pusat	Pusat								997.710,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Penyusunan Rekomendasi Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak										1.581.700,0
		Pusat	Pusat								1.581.700,0
	054 - Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak										705.230,0
		Pusat	Pusat								705.230,0
01.PBD.008	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Menedepankan Keadilan Restoratif				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif			3.000.000,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Menedepankan Keadilan Restoratif										803.554,0
		Pusat	Pusat								803.554,0
	052 - Analisis Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Menedepankan Keadilan Restoratif										945.516,0
		Pusat	Pusat								945.516,0
	053 - Penyusunan Rekomendasi Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Menedepankan Keadilan Restoratif										590.300,0
		Pusat	Pusat								590.300,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	054 - Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Menedepankan Keadilan Restoratif										660.630,0
		Pusat	Pusat								660.630,0
02	<i>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM</i>										1.155.900,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										586.850,0
02.EBA.962	Layanan Umum										586.850,0
	051 - Operasional Manajemen Umum										449.092,0
		Pusat	Pusat								449.092,0
	052 - Operasional Administrasi Ketatausahaan										137.758,0
		Pusat	Pusat								137.758,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										569.050,0
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran										289.078,0
	051 - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran										289.078,0
		Pusat	Pusat								289.078,0
02.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi										216.045,0
	051 - Pelaksanan Pemantauan dan Evaluasi										216.045,0
		Pusat	Pusat								216.045,0
02.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja										63.927,0
	051 - Perencanaan dan Monev Kinerja										63.927,0
		Pusat	Pusat								63.927,0
<b>Total</b>											18.918.620,0

#### B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral Yang Efektif				17.762.720,0				22.016.975,0	17.965.237,0	18.504.195,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		6.562.720,0				9.656.981,0	10.008.491,0	10.308.746,0
01.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum	2	Rekomendasi Kebijakan		1.790.430,0	2	2	2	1.981.946,0	2.041.405,0	2.102.647,0
01.ABD.001.051	Identifikasi Masalah Bidang Materi Hukum	2,0	Laporan	268.224,0	536.448,0	2,0	2,0	2,0	552.901,0	569.488,0	586.573,0
01.ABD.001.052	Analisis Kebijakan Bidang Materi Hukum	2,0	Laporan	255.726,0	511.452,0	2,0	2,0	2,0	536.323,0	552.412,0	568.985,0
01.ABD.001.053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Materi Hukum	2,0	Laporan	154.247,5	308.495,0	2,0	2,0	2,0	317.749,0	327.282,0	337.100,0
01.ABD.001.054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum	2,0	Laporan	217.017,5	434.035,0	2,0	2,0	2,0	574.973,0	592.223,0	609.989,0
01.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum	3	Rekomendasi Kebijakan		2.191.400,0	3	3	3	2.515.153,0	2.590.608,0	2.668.326,0
01.ABD.002.051	Identifikasi Masalah Bidang Penegakan Hukum	3,0	Laporan	258.303,3	774.910,0	3,0	3,0	3,0	815.306,0	839.766,0	864.958,0
01.ABD.002.052	Analisis Kebijakan Penegakan Hukum	3,0	Laporan	220.054,0	660.162,0	3,0	3,0	3,0	691.554,0	712.300,0	733.670,0
01.ABD.002.053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum	3,0	Laporan	148.524,0	445.572,0	3,0	3,0	3,0	687.300,0	707.919,0	729.157,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.ABD.002.054	Tindak Lanjut rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Bidang Penegakan Hukum	3,0	Laporan	103.585,3	310.756,0	3,0	3,0	3,0	320.993,0	330.623,0	340.541,0
01.ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional	1	Rekomendasi Kebijakan		1.099.370,0	2	2	2	1.455.742,0	1.499.413,0	1.544.396,0
01.ABD.004.051	Identifikasi Masalah Bidang Koordinasi Hukum Internasional	2,0	Laporan	130.976,5	261.953,0	2,0	2,0	2,0	320.350,0	329.961,0	339.859,0
01.ABD.004.052	Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional	2,0	Laporan	197.490,0	394.980,0	2,0	2,0	2,0	526.584,0	542.381,0	558.653,0
01.ABD.004.053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Koordinasi Hukum Internasional	2,0	Laporan	156.759,0	313.518,0	2,0	2,0	2,0	392.881,0	404.667,0	416.807,0
01.ABD.004.054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional	2,0	Laporan	64.459,5	128.919,0	2,0	2,0	2,0	215.927,0	222.404,0	229.077,0
01.ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia	2	Rekomendasi Kebijakan		1.481.520,0	2	2	2	1.704.140,0	1.755.265,0	1.807.922,0
01.ABD.005.051	Identifikasi Masalah Bidang Hak Asasi Manusia	2,0	Laporan	221.298,0	442.596,0	2,0	2,0	2,0	578.327,0	595.677,0	613.547,0
01.ABD.005.052	Analisis Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia	2,0	Laporan	202.618,0	405.236,0	2,0	2,0	2,0	448.112,0	461.556,0	475.402,0
01.ABD.005.053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia	2,0	Laporan	197.004,0	394.008,0	2,0	2,0	2,0	423.750,0	436.462,0	449.556,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.ABD.005.054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia	2,0	Laporan	119.840,0	239.680,0	2,0	2,0	2,0	253.951,0	261.570,0	269.417,0
01.ABD.007	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	1	1	1	2.000.000,0	2.121.800,0	2.185.455,0
01.ABD.007.051	Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1,0	Laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	368.158,0	390.579,0	402.296,0
01.ABD.007.052	Analisis Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1,0	Laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	703.846,0	746.710,0	769.112,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.ABD.007.053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1,0	Laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	381.084,0	404.292,0	416.421,0
01.ABD.007.054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1,0	Laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	546.912,0	580.219,0	597.626,0
01.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		11.200.000,0				12.359.994,0	7.956.746,0	8.195.449,0
01.PBD.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1	Rekomendasi Kebijakan		4.200.000,0	1	1	1	4.634.998,0	4.774.048,0	4.917.270,0
01.PBD.003.051	Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1,0	Laporan	633.240,0	633.240,0	1,0	1,0	1,0	672.322,0	692.491,0	713.266,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.PBD.003.052	Analisis Kebijakan Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1,0	Laporan	1.930.605,0	1.930.605,0	1,0	1,0	1,0	2.109.253,0	2.172.531,0	2.237.707,0
01.PBD.003.053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1,0	Laporan	843.094,0	843.094,0	1,0	1,0	1,0	1.036.571,0	1.067.668,0	1.099.698,0
01.PBD.003.054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1,0	Laporan	793.061,0	793.061,0	1,0	1,0	1,0	816.852,0	841.358,0	866.599,0
01.PBD.006	Rekomendasi Kebijakan Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak	1	Rekomendasi Kebijakan		4.000.000,0	1	0	0	4.634.998,0	0,0	0,0
01.PBD.006.051	Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak	1,0	Laporan	715.360,0	715.360,0	1,0	0,0	0,0	736.820,0	0,0	0,0
01.PBD.006.052	Analisis Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak	1,0	Laporan	997.710,0	997.710,0	1,0	0,0	0,0	1.052.917,0	0,0	0,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.PBD.006.053	Penyusunan Rekomendasi Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak	1,0	Laporan	1.581.700,0	1.581.700,0	1,0	0,0	0,0	1.745.232,0	0,0	0,0
01.PBD.006.054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak	1,0	Laporan	705.230,0	705.230,0	1,0	0,0	0,0	1.100.029,0	0,0	0,0
01.PBD.008	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	1	Rekomendasi Kebijakan		3.000.000,0	1	1	1	3.089.998,0	3.182.698,0	3.278.179,0
01.PBD.008.051	Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	1,0	Laporan	803.554,0	803.554,0	1,0	1,0	1,0	827.660,0	852.490,0	878.065,0
01.PBD.008.052	Analisis Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	1,0	Laporan	945.516,0	945.516,0	1,0	1,0	1,0	973.881,0	1.003.097,0	1.033.190,0
01.PBD.008.053	Penyusunan Rekomendasi Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	1,0	Laporan	590.300,0	590.300,0	1,0	1,0	1,0	608.009,0	626.249,0	645.036,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.PBD.008.054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Menedepankan Keadilan Restoratif	1,0	Laporan	660.630,0	660.630,0	1,0	1,0	1,0	680.448,0	700.862,0	721.888,0
02	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM				1.155.900,0				1.617.108,0	1.583.222,0	1.662.384,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		586.850,0				780.387,0	803.799,0	843.989,0
02.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		586.850,0	1	1	1	780.387,0	803.799,0	843.989,0
02.EBA.962.051	Operasional Manajemen Umum	1,0	Layanan	449.092,0	449.092,0	1,0	1,0	1,0	488.218,0	502.865,0	528.008,0
02.EBA.962.052	Operasional Administrasi Ketatausahaan	1,0	Layanan	137.758,0	137.758,0	1,0	1,0	1,0	292.169,0	300.934,0	315.981,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		569.050,0				836.721,0	779.423,0	818.395,0
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan		289.078,0	1	1	1	454.519,0	385.755,0	405.043,0
02.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1,0	Layanan	289.078,0	289.078,0	1,0	1,0	1,0	454.519,0	385.755,0	405.043,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
02.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		216.045,0	1	1	1	290.793,0	299.517,0	314.493,0
02.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1,0	Layanan	216.045,0	216.045,0	1,0	1,0	1,0	290.793,0	299.517,0	314.493,0
02.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan		63.927,0	1	1	1	91.409,0	94.151,0	98.859,0
02.EBD.961.051	Perencanaan dan Monev Kinerja	1,0	Layanan	63.927,0	63.927,0	1,0	1,0	1,0	91.409,0	94.151,0	98.859,0
<b>Total</b>					18.918.620,0	-	-	-	23.634.083,0	19.548.459,0	20.166.579,0

## C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral Yang Efektif		17.762.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.762.720,0
01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		6.562.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.562.720,0
01.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum		1.790.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.790.430,0
01.ABD.001.051	Identifikasi Masalah Bidang Materi Hukum	Utama	536.448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536.448,0
01.ABD.001.052	Analisis Kebijakan Bidang Materi Hukum	Utama	511.452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511.452,0
01.ABD.001.053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Materi Hukum	Utama	308.495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308.495,0
01.ABD.001.054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum	Utama	434.035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	434.035,0
01.ABD.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum		2.191.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.191.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABD.002.051	Identifikasi Masalah Bidang Penegakan Hukum	Utama	774.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	774.910,0
01.ABD.002.052	Analisis Kebijakan Penegakan Hukum	Utama	660.162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660.162,0
01.ABD.002.053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum	Utama	445.572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445.572,0
01.ABD.002.054	Tindak Lanjut rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Bidang Penegakan Hukum	Utama	310.756,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310.756,0
01.ABD.004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional		1.099.370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.099.370,0
01.ABD.004.051	Identifikasi Masalah Bidang Koordinasi Hukum Internasional	Utama	261.953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261.953,0
01.ABD.004.052	Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional	Utama	394.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394.980,0
01.ABD.004.053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Koordinasi Hukum Internasional	Utama	313.518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313.518,0
01.ABD.004.054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Hukum Internasional	Utama	128.919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128.919,0
01.ABD.005	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia		1.481.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481.520,0
01.ABD.005.051	Identifikasi Masalah Bidang Hak Asasi Manusia	Utama	442.596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442.596,0
01.ABD.005.052	Analisis Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia	Utama	405.236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405.236,0
01.ABD.005.053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia	Utama	394.008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394.008,0
01.ABD.005.054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Hak Asasi Manusia	Utama	239.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.680,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABD.007	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.007.051	Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.007.052	Analisis Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.007.053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABD.007.054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Regulasi dan Infrastruktur Kelembagaan serta Operasional Untuk Proses Kepailitan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		11.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.200.000,0
01.PBD.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum		4.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.PBD.003.051	Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	Utama	633.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633.240,0
01.PBD.003.052	Analisis Kebijakan Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	Utama	1.930.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.930.605,0
01.PBD.003.053	Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	Utama	843.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843.094,0
01.PBD.003.054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	Utama	793.061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793.061,0
01.PBD.006	Rekomendasi Kebijakan Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak		4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0
01.PBD.006.051	Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak	Utama	715.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715.360,0
01.PBD.006.052	Analisis Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum Menjelang Pemilu Serentak	Utama	997.710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	997.710,0
01.PBD.006.053	Penyusunan Rekomendasi Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak	Utama	1.581.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.581.700,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.PBD.006.054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Asistensi Penyelesaian Permasalahan Hukum menjelang Pemilu Serentak	Utama	705.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705.230,0
01.PBD.008	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif		3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0
01.PBD.008.051	Identifikasi Masalah dan Agenda Setting Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	Utama	803.554,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803.554,0
01.PBD.008.052	Analisis Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	Utama	945.516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945.516,0
01.PBD.008.053	Penyusunan Rekomendasi Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	Utama	590.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590.300,0
01.PBD.008.054	Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	Utama	660.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660.630,0
02	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM		1.155.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.155.900,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		586.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586.850,0
02.EBA.962	Layanan Umum		586.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	586.850,0
02.EBA.962.051	Operasional Manajemen Umum	Utama	449.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449.092,0
02.EBA.962.052	Operasional Administrasi Ketatausahaan	Utama	137.758,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137.758,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		569.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569.050,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		289.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289.078,0
02.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Utama	289.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289.078,0
02.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		216.045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216.045,0
02.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Utama	216.045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216.045,0
02.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		63.927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.927,0
02.EBD.961.051	Perencanaan dan Monev Kinerja	Utama	63.927,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.927,0
Total			18.918.620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.918.620,0

Jakarta, 14 Mei 2024  
perencana ahli madya

vita rosmita  
NIP. 196206131992032001